

The Sceptre (Kekuasaan) dan The Spectre (Hantu): Dua Wajah Populisme dalam Demokrasi (Liberal)

Didin Sabarudin¹, Rizqi Ghassani²

¹Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, didinsabarudin@ukri.ac.id

²Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, rizqighassani.ukri.ac.id

Abstract: *The phenomenon of populism emerged in contemporary politics in the era of global democracy, including Indonesia, with the trigger being the economic and political crisis. Populism has a positive meaning in (liberal) democracy by placing antagonistic discourse to fight for the values of justice, equality, prosperity, and fairness for the populus which reveals the corruption of the other, the political and business elite in the sceptre (power) of the oligarchy. Populist actors move dynamically and flexibly in the name of the populus as the spectre of the oligarchy by carrying out propaganda of resistance against the sceptre which is corrupt, oligarchic, and oppressive to the people. They fight for the improvement of the people's fate and play an antagonistic role against the oligarchic elite, corruption, globalization with its neo-liberalism. However, populism has a negative meaning as an effort to find a vehicle and entry ticket as a new player in the oligarchy, so that populism becomes rhetoric for efforts to seize power because it was born as part of the oligarchy vortex. That is the purpose of this writing with a critical study as a political philosophy approach using a qualitative explanatory method to examine the changes in the term populism since its emergence as a form of opposition to oligarchic power in (liberal) democracy whose boundaries are no longer clear. Populism can be a transformative force in Indonesia with an antagonistic role against the increasingly strong oligarchic power. However, it failed as an antagonistic anti-status quo and emancipatory force because it also perpetuated the sceptre of corrupt and greedy oligarchy, even forming a final identity as a shadow democratic power, instead of becoming the spectre of oligarchic power.*

Keyword: *democracy, the sceptre, oligarch, populisme, the spectre*

Abstrak: Fenomena populisme muncul dalam politik kontemporer pada era demokrasi global, termasuk Indonesia dengan pemicunya adalah krisis ekonomi dan politik. Populisme bermakna positif dalam demokrasi (liberal) dengan menempatkan wacana antagonistik untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemakmuran, dan keadilan bagi *populus* yang membuka kebobrokan *the other*, elit politik dan bisnis dalam *the sceptre* (kekuasaan) oligarki. Aktor populis bergerak dinamis dan fleksibel atas nama *populus* sebagai *the spectre* oligarki dengan melakukan propaganda perlawanan terhadap *the sceptre* yang korup, oligarkis, dan menindas rakyat. Mereka berjuang untuk perbaikan nasib rakyat dan berperan antagonis terhadap elit oligarki, korupsi, globalisasi dengan neo-liberalnya. Namun, populisme justru bermakna negatif menjadi upaya pencarian kendaraan dan tiket masuk sebagai pemain baru di dalam oligarki, sehingga populisme menjadi retorika bagi upaya perebutan kekuasaan karena lahir sebagai bagian dalam pusaran oligarki. Itulah tujuan dari penulisan ini dengan studi kritis sebagai pendekatan filsafat politik menggunakan metode

eksplanatori kualitatif untuk mencermati perubahan terma populisme sejak kemunculannya sebagai bentuk oposisi terhadap kekuasaan oligarki dalam demokrasi (liberal) yang tidak lagi jelas batasnya. Populisme dapat menjadi kekuatan transformatif di Indonesia dengan peran antagonis terhadap kekuasaan oligarki yang kian menguat. Namun gagal sebagai kekuatan antagonis *anti-status quo* dan emansipatoris karena turut melanggengkan *the sceptre* oligarki korup dan rakus, bahkan membentuk identitas final sebagai kuasa demokrasi bayangan, bukannya menjadi *the spectre* kekuasaan oligarki.

Kata Kunci: demokrasi, kekuasaan, oligarki, populisme, hantu

PENDAHULUAN

"*A spectre is haunting the world-populism*" merupakan pernyataan terkenal yang dilontarkan oleh Marx dan Engel kemudian digunakan oleh Ionescu dan Gellner (Albertazzi and McDonnell, 2008: 1) untuk mengungkapkan fenomena kebangkitan populisme era 1960 di Eropa Barat dengan menjangkau banyak negara di belahan benua lainnya, seperti Amerika Latin dan Utara, Eropa Timur, Afrika, serta Asia, sebagai negara penganut demokrasi dengan paham ideologi politik berbeda. Munculnya populisme menunjukkan akar krisis demokrasi melahirkan kritik atas krisis sistem demokrasi representatif karena kegagalannya menghadirkan keadilan sosial dan bungkam sebagai penyambung lidah rakyat yang menjadi representasinya (Madung, 2018).

Akar munculnya populisme selain dipicu oleh krisis ekonomi dan politik, aspek lainnya juga bisa menjadi pendorongnya, seperti pembaharuan institusi politik, pemerintahan otoriter, dan kediktatoran. Populisme tidak lagi merupakan respon terhadap kehancuran politik, namun turut memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, kemakmuran, dan kedaulatan rakyat, bukan memperjuangkan hirarki yang membuatnya berbeda dari fasisme (Albertazzi and McDonnell, 2008: 3). Dari fenomena tersebut, populisme lebih nampak sebagai ideologi, gagasan, atau gerakan politik yang berupaya mengembalikan kedaulatan rakyat dengan berpijak kepada kesetaraan dan keadilan sebagai norma dasar demokrasi, sehingga tidak lagi menunjukkan sebagai *spectre of democracy* (hantu demokrasi), bahkan lebih terlihat sebagai *spectre of scrupte*, hantu bagi kekuasaan oligarki (Benjamin Arditi dalam Panizza 2005: 72).

Argumen bahwa ide-ide populis sepertinya gagal merepresentasikan gerakan yang memperjuangkan keadilan, tidak lantas membuat oligarki berakhir tergantikan oleh bangkitnya populisme, justru retorika populis bermutasi menjadi bagian dari upaya memperebutkan kekuasaan oligarkis, bahkan menjadi kendaraan bagi para elit oligarkis baru yang berimplikasi faktual telah terjadi dan terlihat di Indonesia. (Hadiz and Robison 2017: 2) mengungkapkan bahwa populisme dapat memengaruhi cara kerja politik oligarki di Indonesia. Faktanya tidak terjadi kontradiksi atau antagonisme saling berhadapan antara oligarki dan populisme. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, dimana populisme menjadi strategi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan oligarkis melalui persaingan demokratis dalam pemilu. Bukannya mengancam oligarki atau menjadi hantu kekuasaan, populisme di Indonesia bahkan menjadi instrumen untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan oligarkis, sehingga oligarki mengambil alih populisme yang semakin menghujam tajam lebih dalam akar kepentingannya daripada menentanginya.

Fenomena populisme tersebut semakin tampak terlihat di era globalisasi dan demokrasi elektoral 15 tahun pasca reformasi bergulir dengan terjadinya kontradiksi gaya kepemimpinan politik Jokowi yang terjebak pada janji perbaikan demokrasi di satu sisi dan semakin menguatnya oligarki politik dan bisnis, otoritarianisme, dan maraknya politik dinasti di sisi lain. Di antara janjinya adalah melakukan advokasi toleransi, pluralisme agama, dan perbaikan ekonomi dalam demokrasi, tetapi pada akhirnya terkooptasi di dalam cengkeraman kekuatan politik identitas dan oligarki bisnis (Bland, 2020). Tulisan ini mencermati

perubahan terma populisme dari awal munculnya merupakan bentuk oposisi kiri terhadap kekuasaan berpaham neo-liberal, tidak lagi kentara jelas batas antara keduanya, justru menjadi tiket masuk bagi aktor-aktor baru yang lahir di dalam oligarki itu sendiri. Karenanya, Indonesia perlu beradaptasi terhadap sistem demokrasi dengan mengembalikan kedudukan konstitusi pada posisi fundamentalnya sesuai dengan rumusan *the founding fathers* yang termanifestasikan mencakup pluralitas anak bangsa, adat, dan tradisi beserta budayanya yang terakomodasikan sebagai kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui ideologi Pancasila.

TINJUAN PUSTAKA

1. Definisi Populisme

Terma populisme berasal dari bahasa Latin "*populus*" berarti "*the people*" dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan dengan kata "rakyat" dalam bahasa Indonesia, yang terhubung langsung sangat dekat dengan demokrasi dan dapat diasumsikan, dimana ada demokrasi, disitu ada pula populisme (Decker, 2003). Ambiguitas dan ambivalensi pada populisme membuatnya tidak mungkin untuk menghasilkan definisi tunggal terhadap fenomena demokrasi, seperti pernyataan (Wittgenstein and Anscombe: 1968: 43): "*The meaning of a word is its use in the language,*" dimana populisme memiliki banyak penggunaan dan artinya. Di dalam ruang politik, populisme merupakan senjata retorika utama yang melayani penggunaannya untuk menyerukan kepada siapapun sebagai warga negara atas ketidaksetujuannya dikarenakan tidak bertanggungjawab, tidak senonoh, ancaman, dusta, ketidakjelasan, tidak reliatis, atau apapun. Populisme merupakan konsep yang sulit dipahami dan membingungkan dalam persepsi Laclau (1977: 143). Tidak ada konsensus dalam dunia akademik karena perbedaan paham tentang populisme dan bagaimana seharusnya digambarkan.

Dua dekade lalu, Mudde (2007: 543) meletakkan fondasi awal untuk konsensus populisme ketika mendefinisikannya memiliki dua poin umum, yaitu elit dan rakyat dengan kehendak umum, seperti ungkapannya: "*as an ideology that considers society to be ultimately separated into two homogenous and antagonistic groups, 'the pure people' versus 'the corrupt elite', and which argues that politics should be an expression of the volonte general of the people*". Identifikasi antagonistik antara *the people* dan *the elite* merupakan diskursif utama populisme untuk menandakan suatu perbedaan dan suatu kepentingan dalam memahami relasi dengan demokrasi liberal berdasarkan teori demokrasi (Schedler, 2024).

Riset akademis kontemporer tentang populisme terus terjadi dalam perselisihan konseptual tanpa akhir, yaitu: *confusion and ambivalence* sebagai konsep Moffit (2020: 94), *the absence of clear conceptualizations and the proliferation of ad hoc definitions* merupakan konsep (Hawkins and Rovira Kaltwasser, 2017), dan *fundamental disagreements about what populism actually means* sebagai konsep Cole (2022: 5). Beberapa cendekia menyebut populisme sebagai konsep tipis atau tebal, beberapa adalah binari, yang lainnya berkelanjutan, beberapa pengarang menganalisis sebagai sikap, yang lainnya adalah diskursus, beberapa menggambarkan oposisi strategis, yang lainnya sebagai sebuah bentuk pemerintahan, dan banyak lagi pembicaraan kritis yang mendukung kejadian sebuah fenomena (Mansbridge and Macedo, 2019).

Beberapa tahun belakangan, kompetisi membingungkan di antara ketidaksaman gagasan tentang populisme telah tergantikan secara perlahan dengan munculnya sebuah konsensus konseptual disebut "*ideational approach*" menjadi *dominant in the political science literature* (Hawkins and Rovira Kaltwasser, 2017: 527) dengan mendefinisikan populisme sebagai *thin-centered ideology* untuk memahami politik sebagai *a Manichean struggle between 'the pure people' versus 'the corrupt elite'* (Hawkins and Rovira Kaltwasser, 2017: 532). Banyak dan lebih banyak lagi pengarang malahan telah meminggirkan kontroversi konseptual yang terjadi tersebut dengan memunculkan konsepsinya sendiri, kemudian berubah dari definisi konsensusnya tentang populisme, bahkan lebih luas sitasinya (Aslanidis, 2016: 88).

2. Re-deskripsi Demokrasi

Demokrasi liberal menciptakan pembagian struktur antara warga negara dan perwakilan profesional, dimana ambisi keduanya ditunjukkan oleh penyimpangan terlalu berlebihan sebagai bagian dari anti demokratis (Laclau, 2018; Mansbridge and Macedo, 2019: 70-73; dan Kaltwasser, 2012). Apa yang sebenarnya dilakukan oleh aktor populis, paling banyak mahasiswa yang mempelajari populisme setuju untuk mendefinisikan pembelahan antara warga negara dan perwakilan demoratis sebagai pusat konflik sosial, kadang sulit diputuskan apakah pembelahan anti kemapanan politik adalah yang utama atau derivasi kedua (Schedler, 1996). Pada kondisi lebih ekstrim, antagonisme antara warga negara dan elit politik melibatkan sesuatu yang lebih dramatis. Aktor populis bukan partai penantang yang berusaha keras untuk mengisi kesenjangan representasional melalui isu baru yang tidak substantif, namun sistematis. Mereka secara radikal mencela kegagalan demokrasi representatif sebagai pelayan elit yang mengkhianati spirit demokrasi, kemudian menjelaskan ulang eksistensi demokrasi sebagai sistem otoriter yang diakui sebagai akhir demokrasi (Diamond, 2008). Diskursus aktor populis adalah tidak mencela kegagalan demokrasi untuk diabaikan, namun untuk memperbaharainya. Mereka tidak bergerak secara revolusioner yang menjanjikan transformasi struktural dengan mengusung agenda normatif masa depan demokrasi liberal yang berisi unsur otoritarian (Muller, 2017; Urbinati, 2019) dan sebagai partai yang sedang memerintah pada akhirnya akan merusak atau bahkan menghilangkan demokrasi (Levitsky and Loxton, 2013; Ginsburg and Huq, 2018).

Sekolah ideasional memahami populisme sebagai sebuah ideologi tipis yang mengartikulasikan kepercayaan secara umum, bagaimana politik dunia bekerja (Hawkins and Kaltwasser, 2017: 514-515; Mudde, 2004: 544; Schröder, 2023). Ideologi adalah seperangkat gagasan, kurang lebih, tidak terkoneksi dengan realitas. Aktor populis tidak mengklaim konflik abadi antara elit dan warga negara, namun mengkhianati warga negara dalam demokrasi yang sedang berjalan. Faktanya, bahwa gagasan populisme adalah sebuah ikatan gagasan umum tentang natural politik yang dimasukkan ke dalam masalah-masalah empiris. Saintis yang bekerja dalam tradisi, seperti (Laclau, 1977) membicarakan populisme sebagai sebuah ekspresi konflik sehat antara mereka yang di bawah dan mereka yang diatas, karenanya tidak melihat kritik populis tentang demokrasi sebagai distorsi atau ideologis, tetapi sebagai kepercayaan. Populisme masih dipahami sebagai distorsi dan ketidakbenaran yang di dalamnya kritik ideologi menggaungkan realitas eksistensi demokrasi dengan observasi umum para aktor populis sebagai pengguna dan produsernya keranjingan teori konspirasi, politik paranoia, berpikir mitos, cerita bohong, ancaman dan musuh imajiner, hiperbola, kebohongan, informasi salah, informasi menyesatkan, dan menggaungkan kegunaan aktual populisme dalam debat publik (Castanho Silva, Vegetti, and Littvay 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini mengkaji populisme dalam relasi antagonisme antara *populus* dengan elit dan *the other* menggunakan pendekatan filsafat politik Laclau (1977) dan Mouffe (2019) yang disebut juga sebagai studi kritis. Pendekatan ini melihat populisme secara positif sebagai kekuatan emansipatoris dan sebaliknya memandang demokrasi liberal bermasalah sebagai *a full constitution of popular identity*. Konstruksi *mode of identification* atau antagonisme para aktor populis menyatakan terang-terangan membenci korupsi, oligarki, neoliberalisme, globalisasi, kekuasaan asing, dan elitisme serentak mencintai rakyat yang tertindas atau berjuang demi nasib mereka. Konsepsi ideasional melihat populisme sebagai konsep politik yang menekankan konflik antara massa dengan kebajikan moral dan elit politik korup. Laclau dalam filsafat politiknya mendefinisikan *populus* (rakyat) sebagai "*empty signifier*" (penanda kosong) produk identifikasi dan konstruksi yang membuat populisme sebagai ideologi dan fenomena politik yang kuat dengan wujud pembentukan identitas popular.

Dalam masyarakat demokratis modern, populisme dilihat sebagai perlawanan *populus* terhadap struktur kekuasaan represif dan ideologi dominan yang dipegang kelas elit atau *the other* (penguasa politik dan pemodal) dalam demokrasi. *Populus/demos* adalah warga negara, pekerja, asosiasi-asosiasi, partai-partai, dan seterusnya, sementara dalam populisme adalah massa tak terdiferensiasi yang berbeda secara tajam dari demokrasi, meskipun *populus* dan *demos* sama-sama berarti rakyat (Hardiman, 2017: 6). Metode yang digunakan untuk mengelaborasi relasi keduanya berjenis kualitatif-eksplanatori, dimana populisme bernuansa positif secara ideasional sebagai identitas kekuasaan populer yang berpihak kepada rakyat termarginalkan status ekonomi sosialnya dapat berubah menjadi *the sceptre* kekuasaan oligarki dalam demokrasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Populisme dan Kekuasaan

Kebangkitan populisme berawal dari krisis politik dan demokrasi sebagai reaksi terhadap kegagalan partai politik merespons tuntutan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi ekonomi, politik, dan budaya. Kejadian di dalam negeri yang disodorkan populisme dipicu oleh kekecewaan dan ketidakpuasan warga negara terhadap dominasi oligarki politik dan bisnis, menjamurnya perilaku korup elit-elit politik dan birokrasi, serta menguatnya dinasti politik pada berbagai level struktur politik dan birokrasi. Kekecewaan dan ketidakpuasan publik merebak pada realitas politik transaksional yang dipertontonkan dalam panggung kekuasaan oleh para pemangku kekuasaan yang berasal dari partai politik atau yang terafiliasi partai politik melalui mekanisme penunjukan. Fakta tersebut menimbulkan krisis yang diperlihatkan dengan sikap apatis, *a priori*, atau anti-politik pada banyak kalangan warga negara. Populisme menunjukkan eksistensinya melalui para aktornya, apakah mereka pemilik paham kiri yang identik dengan ideologi komunisme, ataupun paham kanan yang terafiliasi dengan basis identitas fundamentalis keagamaan, dimana semua agama memilikinya yang terekspresikan dalam tataran implementasinya melalui perbedaan kanal yang dibuat dan disediakan masing-masing.

Pada kondisi ketidakstabilan politik dan kegamangan masyarakat seperti itu, populisme hadir menyediakan alternatif, umumnya radikal dengan mengaduk-aduk emosi masyarakat melalui isu-isu sentimental ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang. Mereka bergerak dinamis dan fleksibel mengatas namakan *populus* sebagai *the spectre* melakukan propaganda perlawanan terhadap *the sceptre* yang korup, oligarkis, dan menindas rakyat banyak. Mereka berjuang untuk perbaikan nasib rakyat dan berperan antagonis terhadap elit oligarki, korupsi, globalisasi dengan neo-liberalnya. Namun, populisme justru merupakan pencarian tiket sebagai pintu masuk menjadi pemain baru di dalam oligarki, sehingga populisme menjadi retorika bagi upaya perebutan kekuasaan dan bagian dari pusaran oligarki itu sendiri.

Di Amerika Serikat, partai republik dengan identitas kelompok kanan dimana Trump sebagai juru bicaranya sering mengkampanyekan retorika anti-globalisasi, karena dianggap merusak kedaulatan negara dan menjadi akar terorisme. Akan tetapi, hal tersebut hanyalah retorika populis untuk memperbesar sentimen ras kulit putih, sikap anti-Islam, anti-imigran, dan anti-minoritas. Dalam kenyataannya, kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi luar negeri Trump sangat pro-kapitalisme. Di Amerika Serikat, bukan saja kelompok sayap kiri melainkan juga kelompok sayap kanan mengkampanyekan sikap anti-kapitalis dan pengutamaan kepentingan umum di atas kepentingan privat sambil mengecam dengan keras elit politik yang bersekongkol dengan oligarki ekonomi. Kritik tersebut tidak otomatis menunjukkan kelompok sayap kanan anti-kapitalis, terbukti banyak aktivis gerakan *Tea Party* di Amerika Serikat yang mengecam 'perselingkuhan' pebisnis-pebisnis besar dengan elit politik, tetapi mereka sendiri adalah pembela kuat pasar bebas (Mudde dan Kaltwasser, 2017: 13). Tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, hal serupa dialami oleh Indonesia tanpa adanya kontradiksi atau antagonisme antara oligarki dan populisme, bukannya mengancam oligarki atau menjadi *the sceptre* atas kekuasaan, justru oligarki yang mengambil alih

populisme sebagai instrumen untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan oligarkis yang semakin mengakarkan kepentingannya daripada sebagai gerakan yang menentangnya. Gambar dibawah ini menunjukkan sosok populisme Donald Trump pada saat pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 sebagai oligarki politik melakukan pidato kepada publik Amerika Serikat dan dunia mengungkapkan kebijakan kontroversial yang direspon negatif oleh publik domestik dan internasional. Respon negatif publik muncul di media sosial dari publik dalam negeri Amerika Serikat sendiri atas pidato Trump dengan judul yang positif, namun hastag yang muncul adalah kebalikannya, yaitu *“NOT MY PRESIDENT”*.

Gambar Populisme Presiden Amerika Serikat, Donald Trump



Sumber: Facebook(2025)

Bland (2020: 11) menunjukkan fenomena populisme terjadi di Indonesia pada sosok Presiden Jokowi. Pada awal periode kepemimpinannya, Jokowi berjanji akan menjinakkan gurita oligarki yang telah menguasai Indonesia sejak Soeharto, yang melahap kekayaan sumber daya alam Indonesia, merusak birokrasi, dan menipu rakyat. Indonesia baru di bawah kepemimpinannya akan maju dengan perbaikan ekonomi yang memadai, memperbaiki demokrasi, dan keadilan sosial bagi semua. Janji tersebut ditegaskan kembali saat terpilih lagi menjadi Presiden tahun 2019. Namun, semua janji Jokowi pudar di periode kedua kepemimpinannya disebabkan Presiden yang disebut lahir dari warga sipil biasa di luar oligarki politik dan ekonomi, justru telah menjadi sangat tertanam jauh ke dalam politik oligarkis. Blusukan Jokowi menunjukkan sebuah gaya sangat populis, namun realitasnya tidak bisa terlepas dari sokongan kekuatan oligarki politik dan ekonomi dibelakangnya yang terus mengikuti dan mencengkeramnya, seperti diungkapkan oleh Bland (2020: 25):

“Blusukan is emblematic of one key element in Jokowi’s political rise: his talent for retail politics. The other element is his ability to corral local, and then national, elites behind him. The tycoons, party bosses, religious leaders, and generals have brought him the money, political connections, and endorsements he has needed to capitalise on his connection to ordinary voters.”

Blusukan merupakan strategi politik sederhana dan pragmatis Jokowi tentang politik, namun dibalik kesederhanaannya membuat kepemimpinan Jokowi disandera oleh oligarki, taipan, bos partai, konglomerat, dan pemimpin agama. Hal ini membuat janji keberpihakan pada rakyat kecil tidak sepenuhnya terlaksana, dan malah sebaliknya, politik transaksional, korupsi, radikalisme agama, dan perampasan hak warga semakin menjadi-jadi. Populisme pragmatis Jokowi telah bergerak dari demokrasi menuju otoritarianisme dan politik dinasti. Alih-alih memerangi korupsi, membersihkan birokrasi dan menjinakkan oligarki, kepemimpinan Jokowi justru memperkuat oligarki dan membangun dinasti politik baru (Tan, 2020:89). Bahkan, Jokowi entah sengaja atau tidak telah menghidupkan kembali struktur pemerintahan Orde Baru, meraih kekuatan praktis apapun yang membantu mencapai tujuannya dan menjadi salah satu penjaga demokrasi yang buruk (Bland, 2020: 62). Gagasan

kepemimpinan Jokowi yang terlampau populis dan pragmatis tentang demokrasi membuat kualitas demokrasi semakin menurun. Selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi lebih dipahami sebagai “cara memberi manfaat ekonomi dan sosial” daripada menjunjung tinggi hak-hak sipil dan kebebasan (Bland, 2020: 68).

2. Demokrasi dan Kekuasaan

Demos dan *kratos* dikenal sejak jaman Yunani kuno yang menghubungkan antara *the sceptre* dan *populus* di dalam *polis* dan kemudian berkembang menjadi *nation*. Demokrasi menjadi spirit fundamental dalam pemerintahan modern berkembang luas sangat populer oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln tahun 1863, “*government of the people, by the people, and for the people*”, ungkapan yang disampaikannya setelah dua tahun dilantik menjadi presiden dan dua tahun sebelum meninggal karena pembunuhan. Titik sentral atau inti demokrasi adalah *populus* sebagai pemilik kedaulatan, adagiumnya dimana rakyat tak berdaulat, maka bisa dipastikan demokrasi telah mati. Namun, siapakah rakyat dan apa yang bisa diperjuangkan untuk mencapai tujuan bersama *the spectre* dan *populus*? Definisi dan konstruksinya bisa diinterpretasi menurut berbagai paham yang menentukan kualitas demokrasi, termasuk populisme. Pertarungan politik modern bukan lagi antara sayap kiri dan sayap kanan populisme, namun kompetisi menginterpretasi siapa *demos* dan *populus* yang berdaulat (Bloom dalam Agustín, 2020: 46).

Populisme terkait erat dengan demokrasi yang keduanya sama-sama berakar pada rakyat dan sama-sama menunjukkan kepentingan rakyat sebagai tujuan tertinggi. Secara empiris, populisme dipahami dalam konteks demokrasi liberal bukan pada model-model demokrasi lainnya dengan fakta menunjukkan bahwa semua aktor populis bergerak dalam sistem demokrasi politik yang sedang mewujudkan cita-cita liberal dan demokratis. Populisme menempatkan pendekatan antagonistik antara *demos/populus/people* dan *the other* dengan elit demokrasi dari kekuasaan atau kuasa pemodal sebagai diskursus *anti-status quo*. Antagonisme merupakan modus identifikasi dalam proses dekonstruksi dan rekonstruksi identitas menurut paham populis tentang elit bahwa kekuatan sebenarnya bukan terletak pada pemimpin yang dipilih secara demokratis, tetapi pada beberapa kekuatan bayangan yang terus memegang kekuasaan dan mengancam kedaulatan rakyat. Konstruksinya adalah untuk meloloskan aktor populis yang dipilih secara demokratis mampu membereskan problem yang terjadi. Gaya politik seperti itu disebut oleh Hofsader (Mudde dan Kaltwasser, 2017: 12), sejarawan Amerika sebagai paranoid.

Wacana antagonistik perspektif populisme merupakan diskursus dikotomis antara rakyat dan elit, dimana rakyat dikonstruksikan sebagai kelompok besar orang tidak berkekuasaan dalam oposisinya dengan elit yang dikonstruksikan sebagai sekelompok kecil orang yang berkuasa (Agustín, 2020: 47). Pertarungan diskursif antara rakyat tertindas dengan elit oligarkis direkonstruksi ke titik lebih ekstrim oleh aktor populis menjadi pertarungan “kita” versus “mereka”. Populisme mengambil posisi bersama kelompok besar berhadapan dengan elit oligarkis ataupun isu-isu ancaman terhadap kesejahteraan rakyat yang datang dari neo-liberalisme, globalisasi, intervensi asing, imigran, oligarki, dan korupsi. Studi kritis Laclau (1977) mempersepsikan *anti-status quo* merupakan dimensi paling substansial dalam populisme sebagai wujud upaya penaklukan politik terhadap *the other* yang mengeksploitasi dan menghalangi kehadiran penuh *demos/populus/people* dalam sistem politik dengan kehancuran kesejahteraan *demos/populus/people*.

Gagasan *volonte generale* (kehendak umum) menurut perspektif Rousseau semakin mempertajam pertentangan antara *populus* dan *the spectre* dalam relasi antagonistik. Gagasan tersebut tidak melibatkan proses rasional di ruang publik, namun memiliki kepentingan mengidentifikasi musuh bersama dan mengedepankan kehendak umum yang menunjukkan populisme mendukung demokratisasi dan kedaulatan rakyat sebagai subjek politik penentang *status quo* elit oligarki di pusat kekuasaan. Aktor populis yang memperoleh legitimasi sebagai representasi kehendak umum dapat berubah cepat bermetamorfosa

menjadi pendukung otoritarianisme dengan membenarkan tirani mayoritas, penindasan minoritas, dan absolutisme negara demi kedaulatan rakyat, dimana gambaran identitas tersebut tampak pada sosok Trump, Presiden Amerika ke-45 dan 47. Di Indonesia, sosok Presiden ke-7 Jokowi muncul menunjukkan karakter populisme dengan mendorong pelibatan partisipasi publik yang memberikan ruang bagi publik untuk turut serta mengawasi pembuatan keputusan negara sebagai implementasi dan bagian inheren semboyan revolusi mental melalui upaya membangun karakter bangsa, seperti diungkapkannya:

”Saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan” (Yatim, 2015: 182-183).

Kontradiksi ungkapan tersebut terjadi akibat Jokowi terjebak dengan gaya kepemimpinan politiknya sendiri yang telah disampaikannya tentang janji perbaikan demokrasi karena menguatnya oligarki, otoritarian, dan politik dinasti. Jokowi berjanji pula untuk mengadvokasi toleransi dan pluralisme agama, tetapi pada akhirnya terkooptasi dalam cengkeraman kekuatan politik identitas konservatif, seperti ungkapan Bland (2020: 13):

“The president is caught between the promise of democracy and the deep roots of authoritarianism in Indonesia. Jokowi has made economic growth the centrepiece of his administration. But he has been unable to square the desperate need for foreign investment with a culture of protectionism and scepticism towards economic liberalisation. He has attempted to advocate for religious tolerance and diversity. But he has ended up co-opting, or being coopted by, the forces of conservative Islam.”

KESIMPULAN

Kekuasaan dan demokrasi pada jaman kontemporer sudah bergeser dari fondasi awalnya, dimana titik pijak sentral demokrasi adalah *demos/populus/people* sebagai sang pemilik kedaulatan. Demokrasi telah dibajak oleh elit dan the other (oligarki politik dan ekonomi) yang menghadapkan keduanya dalam posisi antagonistik mengakibatkan krisis politik dan demokrasi. Munculnya kekecewaan dan ketidakpuasan *demos/populus/people* disebabkan kegagalan elit merespon tuntutan perbaikan sosial ekonomi sebagai akibat globalisasi, lantas populisme muncul dan menunjukkan eksistensinya. Populisme hadir pada kondisi politik tidak stabil dan masyarakat gamang dengan menyediakan alternatif isu-isu sentimental ekonomi, sosial, dan politik. Para aktor populis bergerak dinamis dan fleksibel mengatas namakan *populus* sebagai *the spectre* melakukan propaganda perlawanan terhadap *the sceptre* yang korup, oligarkis, dan menindas rakyat banyak. Mereka berjuang untuk perbaikan nasib rakyat dan berperan antagonis terhadap elit oligarki, korupsi, globalisasi dengan neo-liberalnya. Namun, populisme justru menjadi kendaraan pemain baru di dalam oligarki, sehingga populisme menjadi retorika bagi upaya perebutan kekuasaan dan bagian dari pusaran oligarki itu sendiri.

Populis, pragmatis dan iliberalis demokrasi membuat demokrasi semakin tergerus di bawah kekuasaan oligarki, konglomerasi, taipan politik, bos partai, dan elit-elit korup. Gagasan demokrasi populisme juga menyebabkan kemerosotoan jaminan akan kebebasan sipil dan hak bersuara. Menguatnya politik identitas yang fundamentalistik dan anti-pluralis, penurunan kualitas demokrasi, ancaman terhadap kebebasan sipil, pelemahan KPK, represi terhadap oposisi, munculnya produk undang-undang kontroversial, serta menguatnya oligarki dan politik dinasti menunjukkan bahwa seorang aktor populis telah bergeser dari

gagasan populisme kiri kepada dukungan terhadap oligarki dan bahkan menjadi aktor baru di dalam politik oligarki.

Populisme sesungguhnya dapat menjadi kekuatan transformatif di Indonesia kalau benar-benar menjadi antagonisme kekuasaan oligarki yang kian menguat. Populisme gagal menjadi kekuatan antagonis dan emansipatoris karena turut melanggengkan kekuasaan oligarki. Gagal menjadi *anti-status quo*, populisme di Indonesia malah membentuk identitas final yang mematikan energi antagonisme dalam demokrasi sehingga ikut melanggengkan kekuasaan elit-elit korup dan rakus. Masalah serius yang turut menyebabkan populisme menjadi the sceptre demokrasi ialah antagonisme politik rentan disalahpahami sebagai formasi politik yang menuntut revolusi permanen yang menciptakan kembali identitas musuh seolah-olah merupakan kondisi mutlak tindakan politik. Hasilnya populisme justru kontraproduktif, di satu sisi menghancurkan ilusi liberalisme tentang pluralisme tanpa antagonisme, tatanan sosial Hobbesian atau masyarakat tanpa kelas Marx. Di sisi lain, rakyat homogen atau massa tak terdiferensiasi dalam populisme itu sendiri juga merupakan sebuah ilusi yang menghilangkan asumsi “dimana ada demokrasi, disitu ada pula populisme”. Diskursus demokrasi substantif ciri khas Indonesia perlu interpretasi ulang dan rekonstruksi agar terjadi adagium “dimana rakyat tak berdaulat, maka bisa dipastikan demokrasi telah mati,” karena hanya sebagai “*the spectre and shadow of democracy*”, bukan idealnya menjadi *the spectre of sceptre*, hantu bagi kekuasaan oligarki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin, Oscar Garcia. (2020). *Left-Wing Populism, The Politics of the People*. UK: Emerald Publishing.
- Albertazzi, Dannie, & Duncan McDonnel. (2008). *Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy*. London: Palgrave Macmillan.
- Bland, Ben. (2020). *Man of Contradictions, Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia*. Australia: Australia Penguin Random House.
- Diamond, Larry. (2008). *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies throughout the World*. New York: Holt.
- Laclau, Ernesto. (2018). *On Populist Reason*. London: Verso, orig. 2005.
- Laclau, Ernesto. (1977). *Politics and Ideology in Marxist Theory*. London: NLB.
- Moffit, Benjamin. (2020). *Populism*. Cambridge, UK: Polity.
- Mouffe C. (2019). *For a Left Populism*. London: Verso Books
- Mudde, Cas. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. p. 277-292.
- Mudde, Cas and Cristobal Rovira Kaltwasser. (2017). *Populism A Very Schort Introduction*. USA: Oxford University Press.
- Müller, Jan-Werner. (2017). *What is Populism?* New York: Penguin Random House.
- Panizza, Fransisco (ed.). (2005). *Populism and the Mirror of Democracy*. London-New York: Verso.
- Urbinati, Nadia. (2019). *Me the People: How Populism Transforms Democracy*. Cambridge and London: Harvard University Press.
- Wittgenstein, Ludwig (1968), *Philosophical Investigations* (trans. Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe) (New York: MacMillan, 3rd edition, orig. 1952).
- Yatim, Usman. (2015). *Jokowi, Revolusi Mental Mewujudkan Indonesia Baru*. Cetakan-1. PT. Semesta Rakyat Merdeka.

Buku Kumpulan Artikel

- Ostiguy, Pierre. (2017). Populism: A socio-cultural approach, *The Oxford Handbook of Populism*, eds. C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. O. Espejo, and Pierre Ostiguy. Oxford, UK: Oxford University Press, 73–97.

Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel

- Betz, H. G. (2008). The growing Threat of the Radical Right. in: Merkel, Peter. H. & Weinberg Leonard. *Right – Wing Extremism in the Twenty-First Century*, pp. 74-96. New York: Routledge.
- Mouffe C (2005) The “End of Politics” and the Challenge of Right-Wing Populism. In: Panizza F. (ed.). *Populism and the Mirror of Democracy*, pp. 50–72. London: Verso Books.

Artikel dalam Jurnal/Majalah

- Aslanidis, P. (2016). Is Populism an Ideology? A Refutation and a New Perspective. *Political Studies* 64/1S: 88–104.
- Castanho. S., B. F. Vegeti., and L. Litvay. (2017). The elite is up to something: Exploring the relation between populism and belief in conspiracy theories. *Swiss Political Science Review* 23/4: 423–443
- Cole, N. Scot. (2022). Time for a change: Replacing the populist model with elite theory. *Journal of Populism Studies* 1: 1–23.
- Ginsburg, T., and A. Huq. (2018). Democracy's Near Misses. *Journal of Democracy* 29/4: 16–30.
- Hadiz, V. R and R. Robison. 2017. “Competing Populism in Post-authoritarian Indonesia,” *International Political Science Review*, Vol. 38 (4).
- Hardiman, F. Budi. (2017). Gerakan Murka Demorkasi. *Kompas*, 2/3/2017, hlm. 6.
- Hawkins, K. A., and C. R. Kaltwasser. (2017). What the (ideational) study of populism can teach us, and what it can't. *Swiss Political Science Review* 23/4: 526–542.
- Kaltwasser, C. R. (2012). The ambivalence of populism: threat and correc□ve for democracy, *Democratization*, 19/2: 184– 208.
- Levitsky, S., and J. Loxton. (2013). Populism and competitive authoritarianism in the Andes. *Democratization* 20/1: 107–136
- Madung, O. G. 2018. Populisme dan Krisis Demokrasi, *Media Indonesia*, 8/3/.
- Mansbridge, J., and S. Macedo. (2019), “Populism and democratic theory,” *Annual Review of Law and Social Science* 15: 59–77.
- Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. *Governance and Opposition*. 541-563.
- Schedler, A. (1996). Anti-Political-Establishment Parties. *Party Politics* 2/3: 291–312.
- Schroeder, R. (2020). The dangerous myth of populism as a thin ideology. *Populism* 3: 13–28.
- Tan, P. (2020). Populisme, Pilkada dan Masa Depan Demokrasi. *JAP UNWIRA*, Vol. 3, No. 2: 80-94.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian

- Decker, Frank. (2003). The Populist Challenge to Liberal Democracy. *Berliner Republik*, 3. http://www.fes.de/ipg/ONLINE3_2003/ARTDECKER.PDF.

Makalah Seminar, Lokakarya, Penataran

- Schedler, A. # 1 (2024). *Review of Democracy*, Open Questions in the Comparave Study of Democracy and Authoritarianism. Democracy Institute, <https://revdem.ceu.edu/2024/02/01/again-what-is-populism>, Februari